

Pandangan PKL terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Taufiq Suni Isnawan¹, Rasendriya Daffa Luthfi Ardhi¹, Christian Salomo Harimurti¹,
Agus Arya Yudhistira Mahendra¹, Yehezkiel Antonio Arruan Nongkang¹

¹Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
221008136@students.uajy.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Isnawan, T. S., Ardhi, R. D. L., Harimurti, C. S., Mahendra, A. A. Y., Nongkang, Y.
A. A. (2026). Pandangan PKL Terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Working Papers Laboratorium Sosiologi FISIP UAJY, Vol. 12(1), 69-80.

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan janji kampanye pemerintah Prabowo-Gibran untuk meningkatkan gizi anak dan menekan *stunting*. Penelitian ini mengkaji pandangan pedagang kaki lima (PKL) terhadap implementasi MBG di Yogyakarta. Menggunakan teori hegemoni Gramsci, teori kekuasaan, dan teori partisipasi politik, penelitian kualitatif ini mewawancarai sepuluh PKL. Temuan menunjukkan bahwa MBG dinilai kurang tepat sasaran, lemah pengawasan mutu, dan menurunkan pendapatan PKL. Program ini lebih menguntungkan pemerintah dan vendor besar, sementara PKL terpinggirkan. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan populis seperti MBG memerlukan perencanaan partisipatif dan pengawasan ketat.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Makan Bergizi Gratis; Pedagang Kaki Lima; Sosiologi Politik; *Stunting*.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal program (MBG) is a campaign promise of the Prabowo-Gibran government to improve children's nutrition and reduce stunting. This study examines the views of street vendors (PKL) regarding the implementation of MBG in Yogyakarta. Using Gramsci's theory of hegemony, theories of power, and political participation theory, this qualitative research interviewed ten street vendors. The findings indicate that MBG is perceived as poorly targeted, lacking in quality supervision, and reducing vendors' income. The program tends to benefit the government and large vendors, while marginalizing street vendors. This study

concludes that populist policies such as MBG require participatory planning and strict oversight.

Keywords: Free Nutritious Meal; Political Sociology; Public Policy; Street Vendors; Stunting.

PENDAHULUAN

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini jatuh kepada para pedagang kaki lima (PKL), karena mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat urban yang kerap bersinggungan langsung dengan dinamika kebijakan publik, termasuk program-program sosial pemerintah. Sebagai pelaku ekonomi informal, pedagang kaki lima tidak hanya memainkan peran penting dalam menyediakan makanan murah dan cepat bagi masyarakat luas termasuk pelajar tetapi juga menjadi saksi langsung dari bagaimana suatu kebijakan dapat memengaruhi struktur sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.

Penelitian ini secara khusus mengkaji program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai program unggulan sekaligus janji kampanye utama dalam rangka mewujudkan visi besar “2045 Indonesia Emas.” Program MBG yang pada awalnya digadang-gadang sebagai solusi atas permasalahan gizi buruk dan *stunting* di kalangan anak-anak sekolah, pada kenyataannya menimbulkan berbagai permasalahan baru ketika diterapkan secara terburu-buru. Beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi sorotan publik dan memicu pertanyaan atas kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan program strategis ini.

Dalam konteks sosiologi politik, program MBG menjadi contoh konkret dari bagaimana sebuah kebijakan yang lahir dari wacana politik elektoral dapat berdampak luas terhadap masyarakat. Terutama ketika kebijakan tersebut menyentuh sektor vital seperti pangan dan kesehatan. Reaksi masyarakat, termasuk pedagang kaki lima, atas program ini memberikan gambaran bagaimana kekuasaan negara melalui kebijakan publik dapat berinteraksi, bersinggungan, bahkan berbenturan dengan kepentingan rakyat kecil.

Penelitian ini, penulis ingin menggali pandangan dan pengalaman para pedagang kaki lima terhadap pelaksanaan program MBG, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Apakah program ini membuka peluang baru bagi mereka, atau justru menyingkirkan mereka dari ekosistem pangan lokal yang selama ini mereka

layani? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi landasan penting dalam menyusun laporan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan dampak kebijakan, tetapi juga menggambarkan relasi kuasa antara negara dan warga negara dalam praktik keseharian.

METODE

Tabel 1. Profil Narasumber

NO	Nama	Identitas
1	Pak Kaswanto	Pak Kaswanto merupakan penjual gorengan di Dusun Ngijo.
2	Mbak Zara	Mbak Zara merupakan pedagang soto di PKL Mrican
3	Pak Supri	Pak Supri Merupakan Pedagang Esteh Jumbo di daerah SD Sokonandi
4	Ibu Pertiwi	Ibu Pertiwi merupakan Pedagang Thai Tea di daerah Alun-Alun Kidul
5	Pak Paijo	Pak Paijo merupakan Pedagang bakso kerikil di daerah Babarsari
6	Mas Ayik	Mas Ayik merupakan pedagang kopi di PKL Mrican
7	Mas Michael	Mas Michael adalah penjual kopi di Embung Langensari
8	Pak Dedi	Pak Dedi merupakan pedagang bakso kawi di daerah Gamping

Pada penelitian ini, kedelapan informan merupakan informan acak dari pelbagai PKL yang berbeda di Yogyakarta. Proses wawancara dilaksanakan secara tatap muka di lokasi usaha masing-masing narasumber, seperti Dusun Ngijo, PKL Mrican, SD Sokonandi, Alun-Alun Kidul, Babarsari, Embung Langensari, dan Gamping, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh dengan melakukan pemetaan dan observasi terlebih dahulu pada daerah yang berpotensi banyak PKL yang berjualan.

Pada proses wawancara, dilakukan dengan semi terstruktur yang mempertimbangkan kesediaan waktu dan konsensus untuk melakukan dokumentasi foto, pencacatan suara dalam durasi wawancara yang berkisar pada 10-15 menit.

Selama proses wawancara, peneliti memperoleh persetujuan narasumber untuk melakukan pencatatan serta dokumentasi sebagai bahan pendukung analisis data.

TEMUAN & PEMBAHASAN

Temuan

Penelitian ini berfokus pada pemerolehan opini narasumber dalam indikator keberhasilan hegemoni pemerintah pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), secara rinci orientasi penelitian ini ingin mengetahui perspektif pedagang kaki lima pada program MBG. Dapat dilihat melalui Pada temuan proses penelitian dan observasi perspektif pada PKL, kami menemukan jawaban dengan konklusi yang serupa. Narasumber yang berjumlah 10 dengan latar berbeda, memiliki pendapat yang kritis mengenai gejala program populis oleh Prabowo-Gibran.

Peneliti menemukan pemaparan jawaban oleh narasumber memiliki kepekaan akan perkembangan informasi program MBG. Narasumber mengikuti program sedari kampanye, peluncuran dalam realisasi hingga dinamika yang terjadi; keracunan, kerugian dan berita yang menyangkut destruktivitas dari program ini.

Tujuan dan Manfaat Program MBG menurut Perspektif Pedagang Kaki Lima

Narasumber beropini bahwa, Program ini memiliki orientasi untuk memberi makan gratis sebagai perbaikan gizi dan pencegahan *stunting*. Selain itu, orientasi awal program ini sebagai bentuk pengelolaan untuk mengatur pola makan anak-anak sebagai target MBG, agar sesuai dalam pemenuhan makanan sehat. Namun demikian, para narasumber juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal program dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

"Kalau program itu kan program Pak Presiden sekarang. Ya, itu, Nek, saya ya ada baiknya sih, tapi sisi lain juga kurang baik ada. Karena ternyata program Pak Presiden itu kayaknya kurang, gimana ya, kayaknya kurang etis lah jika diterapkan dikondisi saat ini." (Pak Kaswanto, Penjual Gorengan dan Sayur Lauk)

"Mungkin ya, sebenarnya membantu untuk kalangan menengah ke bawah, supaya mereka yang biasanya makannya belum bergizi, cuma apa ada kadarnya itu, makanya pemerintah mengandakan seperti itu." (Ibu Pertiwi, Pedagang Thai Tea)

"Kalau menurutku ya, tujuannya itu mungkin kalau misalnya anak-anak itu kan sering jajan sembarangan gitu. Nah dengan adanya

program MBG itu mungkin jadi terkontrol apa yang dia makan pada hari itu." (Zahra, Pedagang Soto PKL)

Target Sasaran Program MBG dan Kriteria Ketepatan Sasaran

Narasumber berpendapat bahwa, jika target adalah anak-anak sekolah dasar Negeri, maka pemerintah harus melakukan pemerataan terlebih dahulu pada sekolah-sekolah di daerah pelosok. Menurut narasumber, beberapa sekolah swasta di kota besar, juga mendapatkan program MBG ini.

Sebagian narasumber berpendapat bahwa, target program MBG seharusnya merupakan ibu hamil jika orientasinya merupakan pencegahan *stunting*. Karena dalam pencegahan, seharusnya dilakukan sedari awal di dalam kandungan.

"Saya juga bingung gitu sasarannya mana. Karena kalau misalnya anak TK pun, kita juga kadang kan anak-anak, eh siswa-siswa gitu kan kayak misalnya picky eater gitu loh... Jadi sebenarnya kalau sasaran kayak gitu tuh, yang bener-bener membutuhkan tuh kayak misalnya orang yang susah. Maksudnya orang yang ekonominya ke bawah. Atau mungkin di daerah terluar." (Zahra, Pedagang Soto PKL Mrican)

"Ibunya. Ini kan masalahnya dari kandungan ya? Ibaratnya itu kan buat anak-anak yang stunting, Itu menurutku dari ibunya dan dari asinya." (Mas Ayik, Owner Koud Coffee PKL Mrican)

Pihak yang Diuntungkan dari Program MBG

Pemaparan narasumber, yang diuntungkan dalam program ini yang pertama adalah pemerintah. Hal ini terjadi karena, Ketika program terealisasi atau ditepati oleh pemerintah khususnya Prabowo-Gibran, pemerintah tidak terbebani akan janji politisnya.

Selain itu, yang diuntungkan yakni, Vendor catering atau pihak ketiga. Narasumber merasa bahwa ada perputaran ekonomi pada realisasinya. Pihak ketiga mendapat biaya dari pemerintah untuk menjalankan distribusi makanan untuk menu MBG.

"Pemerintah bisa diuntungkan dari segi dia buka vendor, sepertinya semua yang terlibat dalam MBG ini diuntungkan dari vendor, pemerintah, anak-anak. Justru yang ngga diuntungkan itu orang

tua si anak ini, karena tetap beli makan juga untuk anaknya." (Mas Ayik, Owner Koud Coffee PKL Mrican)

"Kalau diuntungin sih sebenarnya itu misalnya dari pemerintah kan, kan untuk rakyat, berarti kan yang untungnya rakyatnya." (Dedi, Pedagang Bakso Kawi)

"Dua-duanya. Vendor itu bisa menambah lahan itu kan, usaha, bisa menambah penghasilan gitu. Dari segi anak-anak ya mungkin nambah senang ya, biasanya pagi belum sarapan, terus mau makan tapi uang jajannya sedikit, dapat gratis itu kan senang." (Ibu Pertiwi, Pedagang Thai Tea)

Penyebab Kasus Keracunan dalam Program MBG

Menurut jawaban narasumber, kasus keracunan disebabkan karena tidak hadirnya lembaga pengawasan serta Standar Operasional Prosedur pada vendor katering. Selain itu tidak ada sertifikasi. Alhasil, barang-barang atau bahan baku masak bisa jadi tidak segar dan tidak sehat

Sebagian Narasumber berpendapat bahwa, akibat pemangkasan anggaran pada dana program MBG, yang awalnya berkisar Rp. 15.000 menjadi 10.000 dan terus berkurang, menciptakan vendor mau tidak mau menekan biaya produksi dengan membeli bahan baku yang tidak layak.

Sebagian Narasumber berpendapat bahwa, kasus keracunan karena keteledoran vendor yang menyiapkan makanan terlebih dahulu, lalu didistribusikan tidak secara langsung.

"Mungkin ya, itu karena mungkin ya, mungkin dari pemerintah misalkan dikasih Rp15.000, kayak ada pemangkasan gitu ya, terus diberikan vendor... Jadi jadinya nggak Rp15.000, Rp10.000. Terus kan vendor, mau nggak mau kan Rp10.000 dapet apa ya, seadanya kayak gitu." (Ibu Pertiwi, Pedagang Thai Tea)

"Mungkin itu masalah makanannya, penyimpanannya kurang. Bukan tempatnya lho. Itu masalah, kalau tempatnya sebenarnya dimanapun bisa. Tempat bisa. Tapi kan, dia stok banyak. Otomatis kan, mungkin menumpuk-numpuk, terus cara penyimpanannya salah." (Pak Supri, Penjual Es Teh Jumbo)

"Kalau menurutku ya kalau makanan yang beracun ataupun anak-anak siswa yang keracunan itu ya menurut saya mungkin karena

kurang pengawasan dari pihak vendor makanan jadi kurangnya kontrol kebersihan atau mereka dikejar waktu untuk segera cepat makanya beli bahan yang murah." (Mas Michael, Owner Streetcoffee Embung Langensari)

Evaluasi dan Keberlanjutan Program MBG

Narasumber memaparkan bahwa, jika program ini dilanjutkan seharusnya pemerintah perlu melakukan evaluasi secara sistematis tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki. Namun mayoritas jawaban oleh narasumber menolak program ini untuk dilanjutkan. 'gagalnya' program ini untuk direalisasikan, karena banyak dinamika kerugian bagi target, vendor dan masyarakat menciptakan program ini tidak layak dilanjutkan. Sebagian Narasumber memaparkan bahwa, realistisnya adalah, dana diberikan untuk keluarga yang kemudian makanannya dimasak dan dikelola sendiri.

"Kalau saya, program itu kan sebenarnya belum begitu meluas kayaknya. Belum begitu meluas. Atau mungkin belum begitu mungkin belum sampai 50% mungkin. Kalau saya malah nggak usah dilanjutkan. Daripada mengganggu pendidikan dan sebagainya." (Pak Kaswanto, Penjual Gorengan dan Sayur Lauk)

"Kalau seperti itu, dievaluasi dulu saja. Tidak bisa dipaksain... Berarti belum ada siap. Sementara harus dihentikan dulu saja, dievaluasi. Daripada dipaksakan, terus malah jadi lebih parah." (Pak Supri, Penjual Es Teh Jumbo)

"Atau uang itu mungkin lebih ini ya, misalkan uang dalam arti gini, untuk bayar SPP, atau untuk kayak dana bos dulu gitu, per anak dapat berapa. Nah mending lebih dilarikan ke itu, malah lebih ini." (Ibu Pertiwi, Pedagang Thai Tea)

Kualitas Menu dan Pelayanan Program MBG

Narasumber memaparkan bahwa, jika program ini dilanjutkan seharusnya pemerintah perlu melakukan evaluasi secara sistematis tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki. Namun mayoritas jawaban oleh narasumber menolak program ini untuk dilanjutkan. 'gagalnya' program ini untuk direalisasikan, karena banyak dinamika kerugian bagi target, vendor dan masyarakat menciptakan program ini tidak layak dilanjutkan. Sebagian Narasumber memaparkan bahwa, realistisnya adalah, dana diberikan untuk keluarga yang kemudian makanannya dimasak dan dikelola sendiri.

"Kalau saya katakan bisa seperti itu. Masalahnya kan nggak bisa untuk kita teliti kesehatannya, mengetahui-tahu diboking atau mungkin catering dan sebagainya kan. Nggak tahu kalau sehat atau nggak kan nggak begitu tahu kan. Memang programnya bagus. Tapi buktinya pelaksanaannya di bawah itu kan ada yang kurang menyehatkan mungkin." (Pak Kaswanto, Penjual Gorengan dan Sayur Lauk)

"Ya kebanyakan ibu sih di TV, di media sosial banyak ini ya, banyak minusnya ya. Jadi kalau ada minusnya nanti, ada ini keluar, oh ini, tapi kan yang bagus hanya berapa persen. Minusnya lebih banyak." (Ibu Pertiwi, Pedagang Thai Tea)

"... karena ya ada yang porsinya sedikit, ada yang porsinya banyak ada yang cuman sayur doang, ada yang cuman malah dikasih bahan mentah itu kan ada beberapa kasus seperti itu." (Mas Michael, Owner Streetcoffee Embung Langensari)

Dampak Program MBG terhadap Omset Pedagang Kaki Lima

Walaupun ini merupakan program mandiri oleh sekolah dan bukan Program makan gratis oleh pemerintah. Narasumber yang semula berjualan di depan sekolah dasar merasakan penurunan omset yang signifikan. Terlebih tidak ada kembali anak-anak yang membeli jualan narasumber, karena program ini menekankan makanan sehat.

"Bisa dikatakan ya kena, ya bisa. Memang sekarang atau karena ada program itu, orang jualan sekarang itu saya tiap hari itu berkurang. Maksudnya nggak kayak kemarin-kemarin itu dulu-dulu itu eksis. Jualan laris dan sebagainya. Sekarang itu nggak tahu penyebabnya apa." (Pak Kaswanto, Penjualan Gorengan dan Sayur Lauk)

"Walaupun ini merupakan program mandiri oleh sekolah dan bukan Program makan gratis oleh pemerintah. Narasumber yang semula berjualan di depan sekolah dasar merasakan penurunan omset yang signifikan. Terlebih tidak ada kembali anak-anak yang membeli jualan narasumber, karena program ini menekankan makanan sehat." (Catatan observasi dan wawancara peneliti)

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan sepuluh pedagang kaki lima (PKL) sebagai narasumber, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dianalisis menggunakan teori-teori dalam kajian Sosiologi Politik. Berdasarkan konsep hegemoni dari Antonio Gramsci, program ini merupakan bentuk hegemoni negara, di mana kebijakan dikemas seolah-olah demi kepentingan rakyat, namun di baliknya terdapat upaya negara untuk mempertahankan kekuasaan melalui pengaruh ideologis. Retorika seputar gizi dan *stunting* menjadi cara negara membentuk opini publik agar mendukung program ini tanpa mempertanyakan dampak nyatanya terhadap kelompok kecil seperti PKL. Dalam praktiknya, MBG justru memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Blau dan Karl Marx dalam teori kekuasaan.

Negara dan vendor besar menguasai proses produksi dan distribusi makanan, sementara PKL yang sebelumnya mendapat penghasilan dari siswa sekolah justru kehilangan sumber pendapatan. Ini mencerminkan relasi produksi yang timpang antara pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi dan mereka yang berada di bawah. Dari segi partisipasi politik, teori Samuel P. Huntington dan Michael Rush menunjukkan bahwa masyarakat kecil, termasuk PKL, tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, yang artinya terjadi partisipasi mobilisasi, bukan partisipasi otonom yang bersifat sukarela dan sadar. Selain itu, dari perspektif sosialisasi politik yang dikemukakan Gabriel Almond, program MBG semestinya dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi generasi muda. Namun, jika kualitas pelaksanaannya buruk dan menimbulkan kasus seperti keracunan makanan, justru dapat membentuk sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap negara sejak usia dini. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan publik seperti MBG harus dirancang secara lebih partisipatif, adil, dan inklusif agar benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, bukan hanya sebagai alat pencitraan kekuasaan semata.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pedagang kaki lima (PKL) sebagai narasumber, dapat disimpulkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran memang mengusung tujuan mulia, yakni meningkatkan gizi anak sekolah dan menekan angka *stunting*. Namun dalam praktiknya, program ini justru memunculkan berbagai persoalan yang cukup kompleks. Para PKL memandang bahwa pelaksanaan MBG kurang tepat sasaran

karena tidak memprioritaskan kelompok yang benar-benar rentan, seperti anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau ibu hamil. Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan mutu makanan, ketiadaan SOP yang baku, serta pemangkasan anggaran yang berdampak langsung pada kualitas bahan pangan, hingga memicu kasus keracunan.

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan program belum sepenuhnya tercapai dan bahkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan baru. Selain itu, implementasi MBG juga mempengaruhi ekosistem ekonomi mikro di sekitar sekolah, di mana para PKL mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya belanja siswa terhadap dagangan mereka. Ironisnya, pihak yang justru paling diuntungkan adalah pemerintah yang berhasil menepati janji kampanye populisnya, serta vendor-vendor katering yang memperoleh kontrak penyediaan makanan. Temuan ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa kebijakan populis seperti MBG, tanpa perencanaan matang dan kontrol ketat, belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Bahkan, program ini justru menimbulkan benturan kepentingan dengan warga kecil yang selama ini menggantungkan penghidupan pada aktivitas konsumsi harian siswa. Oleh sebab itu, ke depan diperlukan desain kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap keberlangsungan ekonomi rakyat kecil, agar tujuan pembangunan gizi generasi muda dapat tercapai tanpa meninggalkan mereka yang paling rentan. Saran kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan lebih tepat sasaran, berkualitas, dan tidak menimbulkan kerugian bagi kelompok masyarakat tertentu seperti PKL.

Pertama, pemerintah perlu melakukan pemetaan sosial secara menyeluruh untuk menentukan target penerima manfaat yang lebih selektif, misalnya memprioritaskan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau ibu hamil yang memerlukan asupan gizi tambahan guna mencegah *stunting* sejak dini. Kedua, pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan mutu dan keamanan pangan, termasuk mewajibkan vendor memiliki sertifikasi resmi, menjalankan SOP ketat, serta membuka ruang audit publik agar kualitas makanan dapat terjamin. Ketiga, pemerintah dapat mempertimbangkan skema subsidi langsung kepada keluarga, sehingga orang tua dapat mengatur sendiri kebutuhan pangan anak-anak mereka sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal, termasuk pada PKL dan pelaku usaha kecil di sekitar pemukiman maupun sekolah. Keempat, pemerintah perlu menyediakan program pendampingan bagi PKL agar dapat beradaptasi, misalnya melalui pelatihan usaha makanan sehat yang dapat menjadi mitra penyedia menu tambahan sesuai standar gizi.

Dengan kebijakan yang lebih partisipatif dan berpihak pada semua lapisan masyarakat ini, diharapkan tujuan utama MBG dalam memperbaiki kualitas gizi generasi muda dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi warga kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Little, Brown.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and Power in Social Life*. John Wiley & Sons.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.
- Marx, K. (1906). *Capital: A Critique of Political Economy*. Modern Library.

